

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 – 2017. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

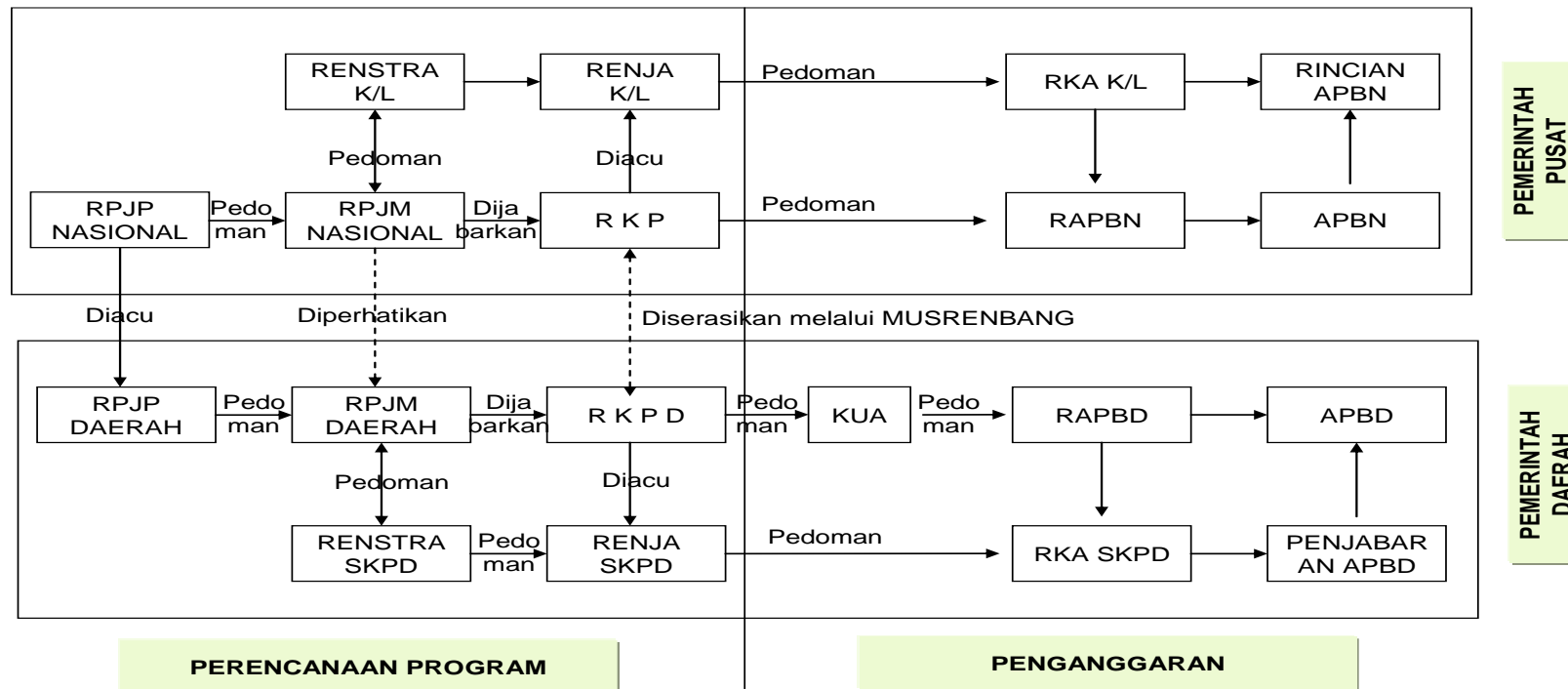
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 – 2017 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Renstra berfungsi sebagai pedoman Bidang-Bidang Teknis dalam melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan Visi dan Misi SKPD.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Renstra SKPD



Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan dokumen lainnya

I.4. Sistematika Dokumen Renstra SKPD

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen Renstra dan Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini memberikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, memberikan informasi capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, memberikan informasi hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
2. Tugas dan fungsi dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
3. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;

4. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017;
2. Akan menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 – 2017;
3. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2012 - 2017.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah :

1. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017;
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, perencanaan dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sasaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.

Fungsi Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai dasar hukum

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, mengoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- g. Penyusunan Program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menunjang Visi dan Misi Gubernur;
- h. Pelaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran badan kesatuan bangsa dan politik;
- i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
- b. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
- c. Pengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan kesekretariatan;
- e. Pengaturan Pelayanan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan kearsipan serta keprotokolan;
- f. Pelaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanakan urusan peningkatan kualitas sumber daya;
- h. Pelaksanakan urusan rumah tangga;

- i. Melaksanakan urusan perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan barang-barang inventaris;
- k. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- l. Pelaksanaan pembinaan staf;
- m. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran, dan laporan.

Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
- c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan;
- e. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. Melaksanakan pembinaan staf;
- i. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas Penatausahaan keuangan, verifikasi dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;
- d. Menyusun anggaran kas;
- e. Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- h. Melaksanakan pembinaan staf;
- i. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perpustakaan, serta menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan administrasi kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/ perawatan barang inventaris;
- b. Mengelola urusan perlengkapan / pengadaan barang;
- c. Mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;

- d. Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
- f. Mengelola urusan kendaraan operasional;
- g. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- i. Menghimpun dan menyusun data pegawai;
- j. Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang;
- k. Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan;
- m. Melaksanakan pembinaan staf;
- n. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghayatan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan.

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- c. Penyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup ideologi negara dan wawasan kebangsaan dengan unit kerja terkait;
- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara

Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas Melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara.

Uraian Tugas Sub Bidang Ketahanan Ideologi dan Bela Negara sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;

- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- f. Meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur;
- g. Melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara;
- h. Melaksanakan penguatan kesadaran bela negara;
- i. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan dilingkungan Sub bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara sebagai bahan pembinaan karir;
- l. Melaksanakan pembinaan staf;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran

Pemerintah di lingkup Sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;

Uraian Tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- e. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pembauran;
- f. Melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- g. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkup tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan pembauran Kebangsaan;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Melaksanakan pembinaan staf;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Kewaspadaan Nasional;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kewaspadaan Nasional;
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Nasional;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewaspadaan nasional;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan kewaspadaan nasional;
- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup kewaspadaan nasional dengan unit kerja terkait;
- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala badan dalam lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan dilingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;

Uraian Tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- e. Melaksanakan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- f. Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparatur;
- g. melaksanakan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- h. memberikan rekomendasi izin penelitian dan survei;
- i. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- j. membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang Kewaspadaan Nasional dalam lingkup tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam lingkup tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;

- m. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan sebagai bahan pembinaan karir;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pembinaan staf;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;

Uraian Tugas Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak Asing;
- f. Melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik;
- g. Melaksanakan mediasi dalam rangka antisipasi konflik sosial;
- h. Mengembangkan kapasitas aparatur dalam pencegahan dan penanganan konflik;

- i. Melaksanakan pengawasan, pendataan orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing di daerah;
- j. Melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam lingkup tugas Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagai bahan pembinaan karir;
- m. Melaksanakan pembinaan staf;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA KEPERCAYAAN DAN KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Kepercayaan dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup Ketahanan ekonomi, Seni, Budaya, Ketahanan Agama Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan unit kerja terkait;
- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. **Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya**

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Ketahanan Ekonomu, Seni dan Budaya;

Uraian Tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha ekonomi;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- j. Melaksanakan Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Baidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan ekonomi, Seni dan Budaya sebagai bahan pembinaan karir;
- m. Melaksanakan pembinaan staf;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan

Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;

Uraian Tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;
- e. Melaksanakan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- f. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- g. Melaksanakan fasilitasi implementasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
- h. Memberikan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan;
- i. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;
- k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan sebagai bahan pembinaan karir;
- l. Melaksanakan pembinaan staf;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup kelembagaan politik pemerintah, partai politik, pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilihan umum;

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bidang Politik Dalam Negeri;
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Politik Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Politik Dalam Negeri;
- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup Politik Dalam Negeri dengan unit kerja terkait;
- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;

Uraian Tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- e. Memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik;
- g. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- h. Meningkatkan kapasitas bagi pengurus partai politik dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- i. Menyusun database partai politik;
- j. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam lingkup tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;

- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- m. Melaksanakan Pembinaan Staf;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum

Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas Melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;

Uraian Tugas Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- f. Melaksanakan fasilitasi implementasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. melaksanakan monitoring dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pilukada;
- h. memberikan tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum

- dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam lingkup tugas Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum;
 - j. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum sebagai bahan pembinaan karir;
 - k. melaksanakan pembinaan staf;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

- a. 1 (satu) jabatan Kepala Badan yang setara dengan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- c. 4 (empat) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa;
- e. 8 (delapan) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan eselon IVa;

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

**RENCANA STRATEGIS BADAN KESBANGPOL
TAHUN 2012 -2017**

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

**KASUBBAG
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN**

KASUBBAG KEUANGAN

**KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

**Ka. BIDANG
IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**

**Ka. BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL**

**Ka. BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SENI, BUDAYA, AGAMA DAN
KEMASYARAKATAN**

**Ka. BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI**

**Ka. SUBBID KETAHANAN IDEOLOGI
NEGARA DAN BELA NEGARA**

**Ka. SUBBID KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN KEAMANAN**

**Ka. SUBBID KETAHANAN
EKONOMI, SENI DAN BUDAYA
0019361**

**Ka. SUBBID FASILITASI
KELEMBAGAAN POLITIK
PEMERINTAHAN DAN PARTAI
POLITIK**

**Ka. SUBBID WAWASAN KEBANGSAAN
DAN PEMBAURAN BANGSA**

**Ka. SUBBID PENANGANAN KONFLIK,
PENGAWASAN OARANG ASING DAN
LEMBAGA ASING**

**Ka. SUBBID KETAHANAN AGAMA
DAN KEPERCAYAAN, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN**

**Ka. SUBBID PENDIDIKAN BUDAYA
POLITIK DAN FASILITASI PEMILIHAN
UMUM**

**2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015.**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung sebanyak 45 pegawai, dengan status kepegawaian 33 PNS, dan 12 Pegawai Honorer. Kualifikasi pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 21 orang, D3 sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 7 orang.

Tabel 2.1.
**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	DOKTORAL	-	-	-
2.	PASCA SARJANA/S2	3	-	3
3.	SARJANA/S1	12	9	21
4.	DIPLOMA IV	-	-	-
5.	DIPLOMA III	1	1	2
6.	DIPLOMA I/II	-	-	-
7.	SLTA	3	4	7
8.	SLTP	-	-	-
9.	SD	-	-	-
JUMLAH		19	14	33

Berdasarkan Eselonering di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang, eselon IV sebanyak 11 orang dan non eselon sebanyak 16 orang.

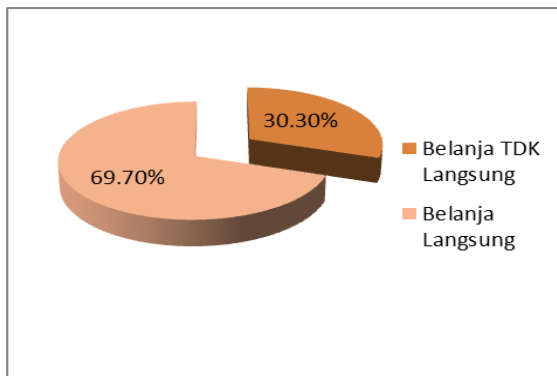
Tabel 2.2.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

NO.	TINGKAT ESELON	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	II A	1	-	1
2.	II B	-	-	-
3.	III A	4	1	5
4.	III B	-	-	-
5.	IV A	7	4	11
6.	IV B	-	-	-
7.	NON ESELON	7	9	16
8.	FUNGSIONAL	-	-	-
JUMLAH		19	14	33

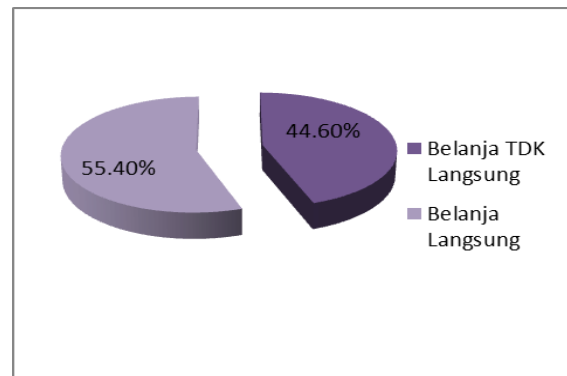
2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2007 – 2012, maka pagu dana dan realisasi terhadap belanja langsung dan belanja langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

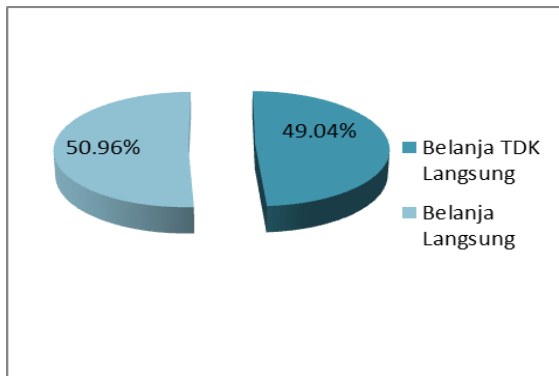
**DIAGRAM PAGU ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2007-2012**



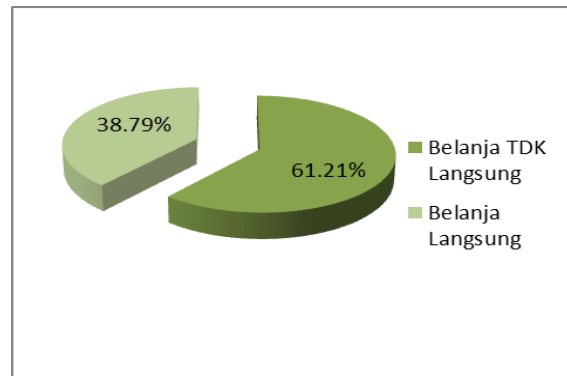
Pagu Dana Tahun 2007



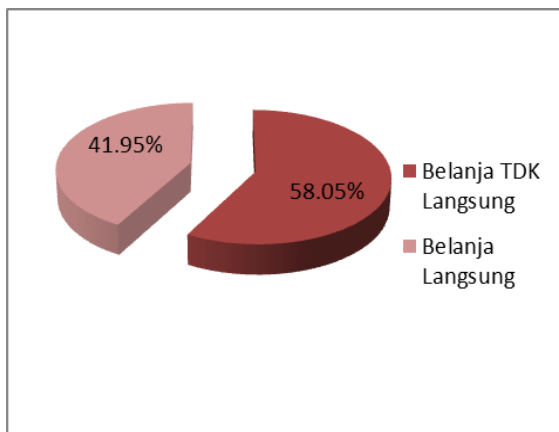
Pagu Dana Tahun 2008



Pagu Dana Tahun 2009



Pagu Dana Tahun 2010



Pagu Dana Tahun 2011

Tabel 2.3.
REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2007 – 2012

No.	Tahun	Belanja TDK Langsung (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Belanja Langsung (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Jumlah Realisasi BTL dan BL (Rp)
1	2007	1,723,358,500	1.183,273,911	68,66	3,963,588,175	3,098,010,931	78,16	4,281,284,842
2	2008	2,636,748,519	1,745,337,547	66,19	2,739,784,905	1,958,324,160	71,48	3,703,661,707
3	2009	1,793,972,650	1,468,996,444	81,89	2,228,773,072	2,074,541,563	93,08	3,543,538,007
4	2010	2,226,426,559	1,998,221,172	91,84	1,379,061,200	1,192,869,248	86,50	3,191,090,420
5	2011	2,226,426,559	2,081,492,613	93,49	1,609,165,075	1,496,388,684	92,99	3,577,881,297
6	2012	2,720,693,271	2,419,006,016	88,91	2,616,340,100	2,216,964,486	84,74	4,635,970,502

Pada umumnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2007-2012 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk tingkat provinsi.
2. Terjalannya Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Instansi Vertikal seperti POLRI, TNI, Kejaksaan, KEMENKUMHAM, dan BIN Daerah Babel melalui Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Peringkat terbaik ketiga dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2010.
4. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

5. Terlaksananya Pemantauan (Monitoring) Pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.
6. Terlaksananya pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Partai Politik (Parpol), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan.
7. Terlaksananya pemberian izin penelitian bagi Mahasiswa S1, S2 dan S3 serta Lembaga Survey dan Instansi Pemerintah.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dengan adanya perubahan paradigma pengawasan dewasa ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi sebagai berikut :

2.4.1. Kekuatan (*Strength*)

Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

2.4.2. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) Kurang sinkronnya program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota.

2.4.3. Peluang (*Oportunity*)

- 1) Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :300/4433A/sj tahun 2010 tentang Peningkatan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi ;
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Masa (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan maupun Partai Politik.
- 3) Tekad Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan “*Good Governance*” dan “*Clean Government*” serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak.

2.4.4. Tantangan (*Threats*)

- 1) Adanya gesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;
- 2) Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;

- 3) Adanya krisis kepercayaan terhadap aparaturnya Pemerintah;
- 4) Belum maksimalnya implementasi peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2007-2011 serta tantangan yang semakin berat pada 2012-2017, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
- c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan SKPD lainnya.

2. Masalah yang bersifat eksternal

- a. Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota maupun dengan instansi vertikal.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMD TAHUN 2012-2017

Memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan tahun 2012- 2017 adalah :

- I. Ekonomi dan SDA
- II. Lingkungan Hidup;
- III. Sarana dan Prasarana;
- IV. SDM dan Kependudukan;
- V. Pemerintahan; dan
- VI. Sosial, Budaya dan Politik

Pada tahap pembangunan lima tahun kedua, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Sesuai dengan visinya, maka perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata. Di samping itu, pada tahap ini juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan.

Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Kerjasama pengembangan ekonomi harus dirintis tidak saja sebatas antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup diyakini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun pertama dan karenanya kebijakan dan upaya konkrit tersebut tetap harus diupayakan pada lima tahun kedua dan seterusnya.

Adapun visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012 – 2017 adalah :

A. VISI MISI

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012 – 2017 adalah ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan.***

Makna pernyataan visi adalah :

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Mandiri* menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju.
4. *Berkeadilan* adalah konsep pembangunan yang mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
5. *Daya saing* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

6. *Sinergitas* dan *konektivitas* dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, yaitu:

- a. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kualitas SDM (Society Empowerment) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.

- e. Perwujudan good governance dan clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang dibentuk di Era Reformasi di Indonesia dan merupakan Provinsi ke-32 yang lahir berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 tahun 2000. Sebagai sebuah provinsi yang baru dibentuk maka harus dilakukan berbagai inovasi untuk perbaikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom khususnya kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di bidang politik dalam negeri dan administrasi publik antara lain adalah:

- (1) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,
- (2) Membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu),
- (3) Penyelesaian perselisihan antara kabupaten/kota,
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.

Mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis, dan berwawasan kebangsaan.

Isu strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012–2017 adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan prioritas (i) Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah; (ii) Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
3. Pengembangan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi wisata.
4. Pengembangan industri unggulan daerah dengan kegiatan prioritas peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan.
5. Pemulihan daya dukung lingkungan dengan kegiatan prioritas rehabilitasi lahan kritis dan bekas pertambangan.

Menyikapi lingkungan dan isu strategis tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan program/kegiatan prioritas antara lain :

1. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
3. Verifikasi bantuan kepada Partai Politik;
4. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu;
5. Pengembangan budaya politik bagi masyarakat;
6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Fasilitasi hubungan Parpol, LSM dan Orkemas dengan melakukan pengembangan pembekalan kemampuan deteksi dini dari berbagai ancaman.
9. Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Ketahanan Bangsa.
10. Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi :

“Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dalam membangun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis dan berwawasan kebangsaan”

Memperhatikan visi tersebut diatas, maka misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

Misi :

1. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis melalui peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat.
2. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial budaya masyarakat.
3. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terhadap potensi konflik.

4.2. Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2012 – 2017 :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik.
2. Meningkatkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan.
3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.

4.3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi.
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.
3. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.

Strategi :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan dan pembauran kebangsaan.
3. Memfasilitasi terwujudnya stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.
4. Peningkatan kewaspadaan nasional di daerah.

Kebijakan :

1. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
2. Meningkatkan dialog dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Penguatan kelembagaan partai politik.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan.
5. Meningkatkan pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara.
6. Peningkatan stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.
7. Meningkatkan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik.
8. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan ketertiban masyarakat.

Tabel 4.1.

**Penentuan Alternatif Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p><u>Kekuatan (Strength) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Etos kerja pegawai yang cukup tinggi; 2) Adanya peraturan Pemerintah yang menyatakan secara jelas peran/tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 	<p><u>Kelemahan (Weakness) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 6) Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan; 7) Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 8) Kurang sinkronnya program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota.
<p><u>Peluang (Opportunity) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam perencanaan dan bidang lainnya; 2) Kesempatan dalam membuat rancangan kegiatan yang mengarah pada kemajuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3) Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas tentang perencanaan pembangunan daerah; 4) Tekad Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan “<i>Good Governance</i>” dan “<i>Clean Government</i>”. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Etos kerja pegawai menjadi lebih baik; 2) Pelaksanaan tupoksi menjadi lebih optimal dari adanya Peraturan Pemerintah dalam menunjang kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin; 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur semaksimal mungkin; 4) Tersinkronisasinya pelaksanaan program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota.

<p>Ancaman (Threats) :</p> <p>5) Adanya gesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;</p> <p>6) Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;</p> <p>7) Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur Pemerintah;</p> <p>8) Belum adanya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional sehingga kinerja pegawai belum optimal.</p>	<p>1. Peningkatan dalam penguatan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara;</p> <p>3. Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah;</p> <p>4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas stakeholder dan tokoh masarakat melalui pendidikan dan pelatihan;</p> <p>2. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan pegawai jabatan fungsional</p>
--	--	--

Pemilihan strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Berdasarkan hasil analisis faktor kunci keberhasilan dengan analisis matriks SWOT di atas maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

**Tabel 4.2.
Penetapan Strategi**

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik.
2.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideology dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan	Persentase pendidik wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Ideologi Negara Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan dan pembauran kebangsaan. Memfasilitasi terwujudnya stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.
3.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap apartir dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Peningkatan kewaspadaan nasional di daerah.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 4.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “ Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Yang Profesional Dalam Membangun Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung Yang Demokratis Dan Berwawasan Kebangsaan ”

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis melalui peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik	Meningkatkan kesadaran politik masyarakat
				Meningkatkan dialog dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
				Penguatan kelembagaan partai politik
Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial budaya masyarakat	Meningkatkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan	Memfasilitasi terwujudnya stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan	Meningkatkan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan
				Meningkatkan pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara
				Peningkatan stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.
Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terhadap potensi konflik	Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Peningkatan kewaspadaan nasional di daerah.	Meningkatkan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik
				Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan ketertiban masyarakat

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi.	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	69.37	68.79	75.32	75.35	75.50	75.55
			Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah	0.05%	0.04%	0.04%	0.10%	0.04%	0.06%
2.	Meningkatnya wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.	Persentase pendidik wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	0.05%	0.06%	0.04%	0.07%	0.04%	0.05%
			Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Ideologi Negara	0.04%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.05%
			Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	10.5%	10.00%	9.00%	16.98%	13.22%	14.50%
3.	Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Gubernur serta visi misi dan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Daerah.
2. Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
2. Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol.
3. Peningkatan Kewaspadaan Dini Bagi Perangkat Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemberdayaan Satuan Linmas dalam menunjang terwujudnya Trantib Swakarsa.
5. Pemantapan Bela Negara bagi Satuan Linmas Kabupaten/Kota.

6. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
7. Bimtek Kewaspadaan Dini bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman.
8. Pelatihan Penanganan Konflik bagi Aparatur.
9. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
10. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
11. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewaspadaan Nasional.
12. Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Intelijen Aparatur Kesbangpol.
14. Fasilitasi Pokja Tim Terpadu Penanganan Konflik.

8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Sosialisasi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama.
2. Forum Pertemuan Pemuda Lintas Agama dan Etnis Prov. Kep. Bangka Belitung.
3. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda.
4. Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
5. Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila bagi Pelajar dan Mahasiswa.
6. Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.
7. Sosialisasi Peningkatan Wawasan Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda.
8. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konsensus Kebangsaan bagi Pemerintah dan Masyarakat.
9. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
10. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Perempuan di 2 Kabupaten.
11. Pembentukan Kader Penggerak Penguatan Ideologi Negara dan Bela Negara.
12. Dialog Penguatan Ideologi Pancasila Lintas Generasi.
13. Workshop Pemantapan Ketahanan Nasional bagi Generasi Muda.
14. Dialog Penguatan Ideologi Pancasila Lintas Agama dan Etnis.
15. Pelatihan Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Masyarakat dan Aparatur.
16. Lomba Pembauran Kebangsaan.
17. Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan.

18. Monitoring, Koordinasi dan Supervisi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
19. TOT Pelatihan Pembauran Kebangsaan.
20. TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
21. Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
22. Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara.
23. Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
24. Fasilitasi Tim Terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan.

9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kep. Bangka Belitung.
3. Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol dan Linmas se-Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
4. Sarasehan Merajut Kebersamaan Lintas Etnis.

10. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Sosialisasi Mengenai HAM dan Hak-Hak Sipil.
2. Sosialisasi Hak-hak Sipil dan HAM bagi Aparatur Pemerintah.
3. Bimtek Mekanisme Penanganan Pelanggaran HAM bagi Aparatur Pemerintah.
4. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintahan dalam Menghadapi Potensi Ancaman.
5. Simulasi Penanganan Konflik.
6. Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

12. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Verifikasi Bantuan Dana Parpol.
2. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.
3. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dan Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintah dan Partai Politik (KPPP).
4. Monitoring dan Pemantauan Pemilukada Gubernur 2012.
5. Monitoring dan Pemantauan Pemilukada 2013.
6. Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia dan Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
7. Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia.
8. Verifikasi Ormas/LSM.
9. Forum Komunikasi dan Koordinasi Partai Politik bagi Kalangan Ormas/LSM.
10. Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.
11. Penyediaan Data Partai Politik.
12. Workshop Pendidikan Politik.
13. Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat.
14. Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas/LSM.
15. Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Perempuan.
16. Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pelajar SLTA.
17. Pengadaan Sistem Informasi Ormas/LSM.
18. Workshop Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan.
19. Workshop Pendidikan Politik bagi Pelajar.
20. Workshop Pendidikan Politik bagi Ormas/LSM dan Masyarakat.
21. Monitoring dan Pemantauan Pemilu 2014.
22. Penyediaan Data Pelaksanaan Pilkada.
23. Sarasehan Kebijakan Esekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Dinamika Hubungan Sosial di Masyarakat.
24. Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP).

25. Penyediaan Data Hasil Pemilu 2014.
26. Bimtek Pendidikan dan Budaya Politik bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
27. Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah

13. Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD dan Pemilukada

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Sosialisasi Undang-Undang Mengenai Pilkada.
2. Monitoring dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pilkada.
3. Penyediaan Data Pilkada.
4. Pemantauan dan Monitoring Pilkada.
5. Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM Mengenai Regulasi Pemerintahan di Bidang Ormas/LSM.

14. Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Fasilitasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Forum Komunikasi dan Koordinasi bagi Perempuan di DPRD, Partai Politik dan Kalangan Ormas/LSM.
3. Dialog Penguatan Peran Lembaga Demokrasi.
4. Pemantauan ,Evaluasi dan Pelaporan di bidang peningkatan Demokrasi.

15. Program Kemitraan Kamtibmas

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
2. Pemetaan Daerah Rawan Konflik.

16. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan Dan Sosial Budaya

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Monitoring, Verifikasi Ormas dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ke Kabupaten/Kota.
2. Monitoring, Verifikasi Ormas dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

3. Monitoring, dan Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
4. Sosialisasi Undang-Undang Orkesmas dan Permendagri tentang Tata Cara Pendaftaran Orkesmas, LSM dan Nirlaba Lainnya.
5. Sosialisasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri tentang Organisasi Masyarakat.
6. Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
7. Forum Koordinasi Peran Pemda dalam Mendorong stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah.
8. Penyusunan Laporan Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah.
9. Forum Konsultasi dan Komunikasi Ormas.
10. Sosialisasi Tentang Ketahanan Seni dan Budaya.

17. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Sosialisasi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).
2. Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
3. Penyusunan dan Pelaporan Data Base Orkesmas LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

18. Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Monitoring dan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Monitoring, Koordinasi dan Supervisi Bidang Perencanaan.
3. Publikasi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Media Cetak.
4. Sosialisasi Penyusunan Program/Kegiatan Badan Kesbangpol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.2. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Kelompok sasaran utama yang dibidang pengawasan adalah aparatur, Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) serta program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.

5.3 PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan untuk Tahun 2012-2017 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Lampiran)

B A B VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai SKPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 melakukan program/kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi SKPD serta dengan memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014 agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 - 2017 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus dan kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 - 2017. Hasil pelaksanaan dari renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum.

**KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Drs. SUNARDI, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631223 198603 1006**

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BESERTA PAGU INDIKATIF, INDIKATOR KINERJA, SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF						KETERANGAN
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Gaji dan tunjangan pegawai	PNS/CPNS di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Lingkungan internal dan eksternal SKPD	757.915.800	1.005.157.700	1.315.370.000	1.530.281.000	1.616.920.000	2.590.000.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Barang/Jasa Surat Menyurat, Materai Lebih Efektif	Institusi pemerintah dan masyarakat	3.775.000	4.900.000	7.350.000	10.000.000	24.500.000	30.000.000	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam Menunjang Kerja Aparatur	kantor Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66.000.000	96.000.000	144.000.000	144.000.000	175.000.000	175.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pekerjaan Aparatur Menjadi Lebih Efektif dan Efisien	kantor Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	35.000.000	45.000.000	55.000.000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47.400.000	53.880.000	80.820.000	114.420.000	114.420.000	120.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor selama 12 bulan	kantor Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	167.462.000	183.418.000	253.956.000	39.456.000	45.000.000	50.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	Pegawai Badan Kesbang pol	59.897.200	75.570.700	200.000.000	100.000.000	125.000.000	200.000.000

				Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan	kantor Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.050.000	30.670.000	46.005.000	46.005.000	50.000.000	55.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik selama 12 bulan	kantor Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.365.000	5.957.000	8.935.500	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bacaan dan Perundang-undangan sebagai sumber informasi	kantor Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.104.000	12.120.000	18.180.000	100.000.000	80.000.000	140.000.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor selama 12 bulan	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.720.000	5.750.000	8.625.000	11.000.000	25.000.000	30.000.000	

		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	Kegiatan, rapat, jamuan terhadap tamu	18.900.000	24.002.000	36.000.000	42.000.000	85.000.000	95.000.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	internal dan eksternal SKPD	349.242.600	400.000.000	426.831.000	336.000.000	400.000.000	900.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Jasa Administrasi Kantor	honorarium di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	257.400.000	273.000.000	315.000.000	
		Koordinasi dan Pengumpulan Data Kesbangpol	Terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Data Kesbangpol	internal dan eksternal SKPD Badan Kesbangpol	-	112.890.000	84.667.500	270.000.000	150.000.000	400.000.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatu	kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	417.585.000	1.008.430.000	490.115.000	1.718.280.000	1.479.500.000	1.705.000.000	

		Pembangunan Gedung Mushola	Pelaksanaan Ibadah Menjadi Lancar	Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	191.100.000	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Kendaraan roda empat dan dua	-	582.060.000	-	-	425.000.000	350.000.000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	46.800.000	10.600.000	216.920.000	50.000.000	60.000.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34.685.000	92.320.000	220.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
		Pembangunan Tempat Parkir	Penataan Kendaraan menjadi Rapi dan Aman	Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14.875.000	-	-	-	-	-	

		Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meja dan Kursi Kantor	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	110.980.000	100.000.000	150.000.000	
		Pengadaan Rumah Genset	Genset Menjadi Aman	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	100.000.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.425.000	10.000.000	-	300.000.000	150.000.000	300.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor selama 12 bulan	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32.100.000	36.050.000	30.000.000	35.000.000	72.000.000	80.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung	Pegawai Badan Kesbang pol	-	-	54.075.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	

		Kantor	Kantor selama 12 bulan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan	Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	135.400.000	241.200.000	175.440.000	175.380.000	340.500.000	365.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya Meja dan Kursi Kantor	Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	20.000.000	27.000.000	30.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pekerjaan Aparatur Menjadi Lebih Efektif dan Efisien	Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	500.000.000	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor	Terpeliharanya Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Taman, tempat parkir dan halaman kantor Badan Kesbangpol	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	

				Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				20.625.000	8.600.000	-	62.000.000	136.557.000	235.000.000	
		Pengadaan Alat Absensi Sidik Jari	Absensi Apatur Menjadi Rapi dan Teratur	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	15.000.000	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20.625.000	8.600.000	-	25.000.000	80.000.000	90.000.000	
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	30.000.000	35.000.000	

		Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya Pengetahuan Penerapan dalam Pelaksanaan Gender bagi Aparatur dan Masyarakat	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	22.000.000	26.557.000	110.000.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-						
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Kesbangpol	Aparatur yang Memiliki Kemampuan Teknis	Pegawai Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	99.500.000	100.000.000	100.000.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				48.360.000	38.300.000	42.088.000	770.840.000	847.924.000	1.527.000.000	

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	% keberhasilan Badan Kesbangpol	-	-	47.500.000	52.250.000	65.000.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aparatur	-	-	47.500.000	52.250.000	65.000.000	
		Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota	Aparatur	-	-	205.340.000	225.874.000	257.000.000	
		Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD	Aparatur	-	-	132.000.000	145.200.000	220.000.000	
		Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka	Tersedianya Hasil Monev Perencanaan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Aparatur dan Masyarakat	-	-	246.500.000	271.150.000	345.000.000	

		Belitung									
		Koordinasi dan Suvervisi Bidang Perencanaan	Koordinasi dan Pengumpulan data Supervisi Kegiatan	Aparatur dan Masyarakat	-	-	-	92.000.000	101.200.000	125.000.000	
		Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol dan Linmas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD	Aparatur	-	38.300.000	42.088.000	-	-	-	
		Penyusunan Rencana Strategis 2012 - 2017	Tersusunnya Renstra Tahun 2012-2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Aparatur	48.360.000	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Renstra SKPD 2017 - 2022	Tersusunnya Renstra Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Aparatur	-	-	-	-	-	450.000.000	

RENCANA STRATEGIS BADAN KESBANGPOL TAHUN 2012 -2017

TOTAL BELANJA	1.244.485. 800	2.060.487. 700	1.847.573. 000	4.081.401. 000	4.080.901. 000	6.057.000. 000	
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BESERTA PAGU INDIKATIF, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN TARGET
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELompok Sasaran	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS												KETERANGAN
				2012		2013		2014		2015		2016		2017		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	3	4	5		6		7		8		9		10	11		
1	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Antisipasi dan Pencegahan Terhadap Hal-Hal yang Berdampak Buruk bagi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			-		-		-		-		500.000.000		550.000.000	

Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Daerah	Tingkat Pemahaman Aparatur dalam mengantisipasi dan mencegah berkembangnya hal-hal berdampak buruk bagi stabilitas nasional dan daerah, ketentraman serta ketertiban masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	385.000.000	
Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersedianya data Orang Asing dan Lembaga Asing di Prov. Kep. Babel	Orang Asing dan Lembaga Asing	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	

2	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Meningkatnya daya tanggap dalam deteksi dini dan cegah dini berbagai potensi konflik			699.544.000		406.753.800		339.578.000		1.784.009.240		1.550.000.000		1.815.000.000
	Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Rasa Aman, Nyaman dan Kondusif Masyarakat dalam Membangun	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	222.545.000	1 Dokumen	246.292.200	1 Dokumen	278.594.000	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol	terciptanya sinergitas dan kebersamaan yang harmonis antara aparat keamanan dengan pemerintah serta masyarakat dalam	Aparatur dan Masyarakat		-	-	-		1 Dokumen	472.700.000	1 Dokumen	630.000.000	1 Dokumen	693.000.000	

Pemantapan Bela Negara bagi Satuan Linmas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Bela Negara bagi Satuan Linmas di Provinsi Kep. Bangka Belitung	Aparatur Linmas	-	40 Orang	80.230.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terwujudnya Situasi Kantibmas yang Kondusif	Aparatur dan Masyarakat	-	-	-	1 Dokumen	29.867.000	1 Dokumen	84.480.000	-	-	-	-	-	-
Bimtek Kewaspadaan Dini bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman	Terwujudnya Situasi Kantibmas yang Kondusif	Aparatur dan Toko FKDM	-	-	-	-	-	61 Orang	274.575.000	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Penanganan Konflik bagi Aparatur	Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Provinsi Kepulauan	Aparatur	-	-	-	-	-	40 Orang	139.254.240	40 Orang	140.000.000	40 Orang	154.000.000	-	-

		Bangka Belitung													
	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Terwujudnya Situasi Kantibmas yang Kondusif di Masyarakat	Aparatur		-	-	-		1 Dokumen	677.400.000	-		-		
	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya Situasi Kantibmas yang Kondusif di Masyarakat	Aparatur		-	-	-			-	1 Dokumen	730.000.000	1 Dokumen	858.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewaspadaan Nasional	Tersedianya Bahan Evaluasi dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Kewaspadaan Nasional	Aparatur		-	-	-			-	-		1 Dokumen	110.000.000	

	Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersedia Data Orang Asing dan Lembaga Asing di Prov. Kep. Babel	Orang Asing dan Lembaga Asing		-	-	-	1 Dokumen	135.600.000	-	-		
	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Intelijen Aparatur Kesbangpol	Terlaksana Fungsi Intelijen Kesbangpol	Aparatur		-	-	-			1 Dokumen	50.000.000	-	
	Fasilitasi Pokja Tim Terpadu Penanganan Konflik	Terwujudnya Situasi Kantibmas yang Kondusif di Masyarakat	Aparatur		-	-	1 Dokumen	31.117.000			-	-	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Peningkatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			217.590.200	372.869.400		1.327.463.000	2.138.995.970		2.233.000.000		5.170.530.303

Sosialisasi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Tokoh Agama dan Masyarakat	60 Orang	33.780.000	60 Orang	43.830.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forum Pertemuan Pemuda Lintas Agama dan Etnis Prov. Kep. Bangka Belitung	Meningkatnya Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama dan Etnis	Pemuda Lintas Agama dan Etnis	147 Orang	108.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda	Meningkatnya Pemahaman Generasi Muda Terhadap Wawasan Kebangsaan	Pelajar dan Mahasiswa	-	-	210 Orang	230.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kegiatan Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspada	Terfasilitasinya Kegiatan FKUB, FKDM, dan FPK	Tokoh Agama dan Masyarakat	3 Dokumen	75.415.200	3 Dokumen	98.423.600	3 Dokumen	41.067.000	-	-	-	-	-	-	-

aan Dini (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)															
Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila bagi Pelajar dan Mahasiswa	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila bagi Pelajar dan Mahasiswa	Pelajar dan Mahasiswa						40 Orang	36.850.000	-	-	-	-	-	
Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	Generasi Muda dan Pelajar						40 Orang	156.864.200	200 Orang	520.000.000	200 Orang	650.000.000		
Sosialisasi Peningkatan Wawasan Ideologi Pancasila	Meningkatnya Pemahaman Wawasan Ideologi	Pelajar dan Mahasiswa						35 Orang	85.000.000	-	-	50 Orang	150.000.000		

bagi Perempuan di 2 Kabupaten	Perempuan														
Pembentukan Kader Penggerak Penguatan Ideologi Negara dan Bela Negara	Terciptanya Kader Penggerak Penguatan Ideologi Negara dan Bela Negara	Aparatur dan Masyarakat													650.000.000
Dialog Penguatan Ideologi Pancasila Lintas Generasi	Meningkatkannya Pemahaman dalam Penguatan Ideologi Pancasila Lintas Generasi	Pelajar, Mahasiswa dan Ormas													75 Orang 120.000.000
Workshop Pemantapan Ketahanan Nasional bagi Generasi Muda	Meningkatkannya Pemantapan Ketahanan Nasional bagi Generasi Muda	Pelajar dan Mahasiswa													-
Dialog Penguatan Ideologi Pancasila	Meningkatkannya Pemantapan dan	Toko Masyarakat													75 Orang 120.000.000

	Lintas Agama dan Etnis	Penguatan Ideologi Pancasila Lintas Agama dan Etnis	t												
	Pelatihan Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Masyarakat dan Aparatur	Meningkatkannya Kesadaran Bela Negara	Aparatur dan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	75 Orang	250.000.000	
	Lomba Pembauran Kebangsaan	Terciptanya Pembauran Kebangsaan	Kelompok Masyarakat dan Aparatur Pemerintah		-	-	367 Desa/Kelurahan	280.530.000	367 Desa/Kelurahan	299.006.720	-	-	-	-	
	Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan	Terciptanya Pembauran Kebangsaan	Kelompok Masyarakat dan Aparatur Pemerintah		-	-	-	-	-	-	367 Desa/Kelurahan	230.000.000	367 Desa/Kelurahan	253.000.000	

Monitoring , Koordinasi dan Supervisi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Termonitoringnya dan Terkoordinasinya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Aparatur		-	-	1 Dokumen	128.425.000		-	-	1 Dokumen	450.000.000		
TOT Pelatihan Pembauran Kebangsaan	Tersedianya Tenaga-Tenaga Pelatih Pembauran Kebangsaan	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		-	-	40 Orang	223.700.000	40 Orang	249.006.720	40 Orang	275.000.000	40 orang	300.250.000	
TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Tersedianya Tenaga - Tenaga Pelatih Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		-	-		-	100 Orang	247.810.000	100 Orang	273.000.000	100 orang	299.850.197	
Pembinaan Pendidikan	Terbentuknya Kepengurusan	Aparatur Pemerintah		-	-		-	1 Dokumen	490.518.880		-	-		

Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	h dan Masyarakat													
Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbentuknya Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat									1 Doku men	540.000.000	1 Doku men	593.527.844	
Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara	Meningkatnya Semangat Bela Negara	Gene rasi Muda dan Pelajar							40 Orang	111.419.010		-	75 Orang	350.000.000	
Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Agama dan Tokoh	Kelo mpok Aparatur, Akad emisi, Toko h Aga ma dan							100 Orang	296.613.440	100 orang	395.000.000	100 orang	358.902.262	

		Masyarakat.	Tokoh Masyarakat												
	Fasilitasi Tim Terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan	Terciptanya Situasi Keamanan yang Kondusif	Pokja Gangguan Keamanan Dalam Negeri		-	-	1 Dokumen	238.191.000		-		-			
4	PROGRAM KEMITRAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Tumbuhnya rasa solidaritas antar sesama umat dalam berkehidupan berbangsa			72.071.600	103.018.000		150.275.000		309.406.720		300.000.000		348.921.131	
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Meningkatnya Pemahaman Pembauran Kebangsaan	Anggota Forum Pembauran Kebangsaan		-	-	40 orang Pengurus FPK	43.425.000	40 orang Pengurus FPK	84.006.720	40 orang Pengurus FPK	95.000.000	40 orang Pengurus FPK	101.648.131	

	Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	Meningkatnya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	Anggota Forum Pembauran Kebangsaan		-			40 orang Pengu rus FPK	63.425 .000		40 orang Pengu rus FPK	225.40 0.000	40 orang Pengu rus FPK	205.00 0.000	40 orang Pengu rus FPK	247.27 3.000
	Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol dan Linmas se-Provinsi kepulauan Bangka Belitung	Persamaan Pandangan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kesbangpollinmas	Aparatur	40 Orang Aparatur Kesbangpollinmas	72.07 1.600	24 Orang Aparatur Kesbangpollinmas	103.0 18.00 0		-			-		-		-
	Sarasehan Merajut Kebersamaan Lintas Etnis	Meningkatnya Rasa Kebersamaan Lintas Etnis	Tokoh Masyarakat		-			40 Orang Tokoh Masyarakat	43.425 .000			-				-
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK	Meningkatnya Pemahaman dalam menghadapi segala			37.19 7.500		112.5 67.40 0		-			-		750.00 0.000		825.00 0.000

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	potensi ancaman														
Sosialisasi Mengenai HAM dan Hak-Hak Sipil	Pemahaman Aparatur mengenai HAM dan Hak-Hak Sipil	Aparatur Linmas se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	80 Orang	37.197.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Hak-hak Sipil dan HAM bagi Aparatur Pemerintah	Pemahaman Aparatur mengenai HAM dan Hak-Hak Sipil	Aparatur Linmas se-Provinsi Kep. Bangka Belitung		-	40 Orang	37.105.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimtek Mekanisme Penanganan Pelanggaran	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan	Aparatur		-	40 Orang	75.461.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	an HAM bagi Aparatur Pemerintah	Pelanggaran HAM													
	Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintahan dalam Menghadapi Potensi Ancaman	Tersedianya aparatur yang siap menghadapi segala potensi ancaman	Aparatur dan Masyarakat		-		-		-		-	40 Orang	120.000.000	40 Orang	132.000.000
	Simulasi Penanganan Konflik	Terminimalisirnya dampak potensi konflik	Aparatur dan Masyarakat		-		-		-		-	60 Orang	175.000.000	60 Orang	192.500.000
	Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Dinamika Perkembangan Radikalisasi Terorisme	Aparatur dan Masyarakat		-		-		-		-	60 Orang	455.000.000	60 Orang	500.500.000

	Adiktif Lainnya	Penyalahgunaan Narkotika													
7	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik			266.651.000	482.600.600		656.988.000		1.147.742.860		570.000.000		1.500.000.000	
	Verifikasi Bantuan Dana Parpol	Bantuan Kepada Partai Politik Tersalurkan	Partai Politik	1 Dokumen	24.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	Bantuan Kepada Partai Politik Tersalurkan	Partai Politik		-	1 Dokumen	20.450.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	43.900.000		1 Dokumen	50.000.000	

Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dan Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintah dan Partai Politik (KPPP)	Terverifikasi 11 (sebelas) Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan data base kelembagaan politik partai politik	Partai Politik		-							2 Dokumen	150.000.000	-	
Monitoring dan Pemantauan Pemilukada Gubernur 2012	Tersedia Data dan Informasi Tahapan Pilkada Gububernur dan Wakil Gubernur 2012	Aparatur	1 Dokumen	76.586.200									-	
Monitoring dan Pemantauan Pemilukada 2013	Tersedia Data Pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wa	Aparatur		-	1 Dokumen	71.808.400							-	

Indeks Demokrasi Indonesia dan Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	t													
Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia	Tercapainya Indeks Demokrasi Indonesia di Prov. Kep. Bangka Belitung	Aparatur dan Masyarakat	30%	122.884.800	30%	93.281.200	100.000.000	30%	191.496.000	-	-				
Verifikasi Ormas/LSM	Adanya Legalitas dan Tertib Administrasi Keberadaan Ormas/LSM	Ormas/LSM		-	1 Dokumen	17.087.000	-	-	-	-	-				
Forum Komunikasi dan Koordinasi Partai Politik bagi	Meningkatnya Kebijakan Komunikasi dan Koordinasi Partai	Aparatur		-	-	-	-	60 Orang	63.368.000	-	-				

	Kalangan Ormas/LSM	Politik bagi Partai Politik dan Ormas/LSM													
	Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Undang-Undang bidang Politik	Pengurus Parpol		-			40 Orang	65.000.000		-	40 Orang	70.000.000		-
	Penyediaan Data Partai Politik	Tersedianya Informasi Terkait Partai Politik prov. Kep. Bangka Belitung	Partai Politik		-			10 Buku	20.000.000		-	-	-		-
	Workshop Pendidikan Politik	Meningkatnya Pemahaman tentang Politik bagi Masyarakat, Kaum Perempuan dan Pelajar	Masyarakat, Kaum Perempuan dan Pelajar		-					300 Orang	448.058.260		-	150 Orang	250.000.000

			Kabu paten													
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman tentang UU Tentang Partai Politik dan UU Penyelenggaraan Pemilu	Apartur dan Pengurus Parpol	-	100 Orang Aparatur dan Pengurus Parpol	61.91 1.600	-	-	-	-							
Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas/LSM	Peningkatan Intensitas Komunikasi dan Konsultasi antar LSM/Ormas	Pengurus Ormas/LSM	-	100 Orang Pengurus LSM/Ormas	59.08 0.800	-	-	-	-							
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Perempuan	Peningkatan Pemahaman Perempuan tentang UU Tentang Partai Politik dan	Masyarakat	-	100 Orang Masyarakat	59.08 0.800	-	-	-	-							

		UU Penyelenggaraan Pemilu													
	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pelajar SLTA	Peningkatan Pemahaman Pelajar SLTA tentang UU Tentang Partai Politik dan UU Penyelenggaraan Pemilu	Pelajar SLTA		-	100 orang Pelajar SLTA	59.080.800		-		-		-		-
	Pengadaan Sistem Informasi Ormas/LSM	Database Organisasi Kemasyarakatan secara Online	Pengurus Ormas/LSM		-	1 Dokumen	40.820.000		-		-		-		-
	Workshop Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan	Meningkatkan Pemahaman Pengetahuan Politik Perempuan di Belitung dan Belitung	Masyarakat		-			100 Orang	97.600.000		-		-		-

		Timur													
	Workshop Pendidikan Politik bagi Pelajar	Meningkatnya Pemahaman Politik bagi Pelajar	Pelajar					150 Pelajar	120.000.000						
	Workshop Pendidikan Politik bagi Ormas/LSM dan Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Politik bagi Ormas/LSM dan Masyarakat	Anggota Ormas/LSM dan Masyarakat					150 Orang Anggota Ormas/LSM dan Masyarakat	120.000.000						
	Monitoring dan Pemantauan Pemilu 2014	Tersedianya Data dan Informasi Tahapan Pemilu 2014	Aparatur					1 Dokumen	71.388.000						
	Penyediaan Data Pelaksanaan Pilkada	Tersedianya Dokumen Proses Pelaksanaan Tahapan Pilkada di 4 Kabupate	Aparatur							5 Laporan	148.256.000				

		n Tahun 2015													
Sarasehan Kebijakan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Dinamika Hubungan Sosial di Masyarakat	Meningkatnya Kebijakan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Dinamika Hubungan Sosial di Masyarakat	Masyarakat								50 Orang	61.400.000				
Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP)	Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik di Provinsi dan 7 kabupaten /Kota	Partai Politik								10 Buku	98.176.000			10 Buku	100.000.000
Penyediaan Data Hasil Pemilu 2014	Tersedianya Data Hasil Pemilu 2014	Aparatur								5 Papan Pengumuman/ Display	38.000.000				

	Workshop Pendidikan dan Budaya Politik bagi Aparatur Kesbangpol, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terciptanya Kondisi yang Kondusif Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Aparatur Kesbangpol, Camat, Lurah dan Kepala Desa		-		-		-		-		427 Orang Camat, Lurah dan Kepala Desa	750.000.000	
	Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya Data Perkembangan Situasi Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Aparatur		-		-		-		-		1 Dokumen	350.000.000	
8	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PILPRES, PEMILU DPRD DAN	Jumlah Partisipasi Masyarakat			-		-		-		-			1.000.000.000	1.375.000.000

	Demokrasi	Lembaga Demokrasi	terkait dan Masyarakat													
	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang peningkatan Demokrasi	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Peningkatan Demokrasi	Provinsi dan 7 Kab/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		-	-	-	-	-	-			1 Dokumen	100.000.000		
10	PROGRAM KEMITRAN KAMTIBMAS	meningkatkan pemahaman dalam menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat			-											
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksana Koordinasi dan Fasilitasi bagi Forum	Pengurus FKDM		-	-	-	-	-		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	115.500.000		

		Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)													
	Pemetaan Daerah Rawan Konflik	Tersedianya Peta data Daerah Rawan Konflik untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial	Aparatur dan Masyarakat		-	-	-	-			1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	
1 1	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI, BUDAYA, AGAMA, KEPERCAYAAN DAN SOSIAL BUDAYA	1. Meningkatkan hubungan toleransi antar umat beragama . 2. Terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi. 3. Meningkatnya	Aparatur dan Ormas		-	-	-	25%	693.788.210	35%	800.000.000	40%	1.375.000.000		

	peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat.														
Monitoring , Verifikasi Ormas dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ke Kabupaten/Kota	Tersedian ya Data-Data pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Aparatur dan Ormas								1 Doku men	252.50 3.470	-			
Monitoring , Verifikasi Ormas dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,	Tersedian ya Data-Data pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan	Aparatur dan Ormas											1 Doku men	300.00 0.000	

	Agama dan Kemasyarakatan	Kemasyarakatan																	
	Monitoring, dan Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Tersedianya Data-Data pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Aparatur dan Masyarakat														1 Dokumen	320.000.000	
	Sosialisasi Undang-Undang Orkesmas dan Permendagri tentang Tata Cara Pendaftaran Orkesmas, LSM dan Nirlaba Lainnya.	Terwujudnya Pemahaman tentang UU Keormas dan Pendaftaran Ormas	Ormas, Masyarakat dan Aparatur															100 Orang	115.853.640

Sosialisasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri tentang Organisasi Masyarakat	Meningkatnya jumlah ormas dan aparatur yang memahami tentang UU ormas	Ormas, Masyarakat dan Aparatur	-	-	-	-	-	-	114 Orang Pengurus Ormas dan Aparatur	150.000.000	114 Orang Pengurus Ormas dan Aparatur	250.000.000
Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	terlaksananya fasilitasi kegiatan FKUB	Anggota FKUB	-	-	-	-	1 Dokumen	325.431.100	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	170.000.000
Forum Koordinasi Peran Pemda dalam Mendorong stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah	terjalinnnya Koordinasi antar Pemda dan Ormas	Ormas dan Aparatur	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000
Penyusunan Laporan Pemantauan	tersedianya data/dokumen hasil pemantau	Aparatur dan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	220.000.000

	Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah	an stabilitas ketersediaan sembako di daerah	t												
	Forum Konsultasi dan Komunikasi Ormas	Terciptanya Komunikasi Antar Ormas dan Aparatur	Ormas dan Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	90.000.000		
	Sosialisasi Tentang Ketahanan Seni dan Budaya	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Tentang Ketahanan Seni dan Budaya	Aparatur dan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	175.000.000		
1 2	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	1. Meningkatkan hubungan toleransi antar umat beragama . 2.			-	-	112.017.000	-	-	-	-	-	-		

		Terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi. 3. Meningkatnya peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat.													
	Sosialisasi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama	Pengurus FKUB dan Masyarakat		-	-	60 Orang	50.250.000		-	-		-		
	Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama	Pengurus FKUB		-	-	1 Dokumen	40.767.000		-	-		-		
	Penyusunan dan Pelaporan Data Base Orkesmas	Tersedianya Informasi data Orkesmas	Orkesmas, LSM dan		-	-	10 Buku	21.000.000		-	-		-		

	LSM dan Lembaga Nirlaba Laninnya	, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya di Prov. Kep. Bangka Belitung	Lembaga Nirlaba Lainnya												
13	PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.							40.000.000				100.000.000		150.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengelolaan Administrasi Urusan Kesbangpol Semakin Efektif, Transparan dan Kuntabel	Aparatur					1 Dokumen	40.000.000						

Publikasi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Media Cetak	jumlah buletin yang tercetak, Jumlah brosur yang tercetak ,Jumlah standing banner yang tercetak	Aparatur dan Masyarakat	-	-	-	-	60 buah, 500 exsp, 10 buah	50.000.000	-
Sosialisasi Penyusunan Program/ Kegiatan Badan Kesbangpol se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	meningkatkan pemahaman aparatur badan kesbangpol tentang penyusunan program/kegiatan	Aparatur	-	-	-	-	30 Orang Aparatur	50.000.000	50 Orang Aparatur 150.000.000
TOTAL BELANJA			1.293.054.300	1.477.809.200	2.626.321.000	6.073.943.000		8.103.000.000	14.409.451.434